DOKUMEN EVALUASI KINERJA PEGAWAI

PERIODE : TAHUNAN 2024

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE PENILAIAN:
1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

1.	PEGAWAI YANG DINILAI		
	NAMA	:	IKA RAHAYU MURWANIATUN, S.E, M.M
	NIP	:	197605082006042003
	PANGKAT/GOL RUANG	:	Pembina / IV/a
	JABATAN	:	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN
	UNIT KERJA	:	SUB BAGIAN PROGRAM
2.	PEJABAT PENILAI KINERJA		
	NAMA	:	OKY HARIS SETYAWAN, S.STP, M.M
	NIP	:	198510102003121001
	PANGKAT/GOL RUANG	:	Pembina / IV/a
	JABATAN	:	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
	UNIT KERJA	:	SUB BAGIAN PROGRAM
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA		
	NAMA	:	RUDI NUGROHO, SE.,M.M.
	NIP	:	197005241996031003
	PANGKAT/GOL RUANG	:	Pembina Tingkat I / IV/b
	JABATAN	:	SEKRETARIS
	UNIT KERJA	:	SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4.	EVALUASI KINERJA		
	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	:	-
	PREDIKAT KINERJA PEGAWAI	:	BAIK
5.	CATATAN/REKOMENDASI		

Semarang, 2 Januari 2025
7. Pegawai yang Dinilai

IKA RAHAYU MURWANIATUN, S.E, M.M
197605082006042003

Semarang, 2 Januari 2025
8. Pejabat Penilai Kinerja

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BPKAD

OKY HARIS SETYAWAN, S.STP, M.M
198510102003121001

EVALUASI KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF

PERIODE: TAHUNAN 2024

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	IKA RAHAYU MURWANIATUN, S.E, M.M	1	NAMA	OKY HARIS SETYAWAN, S.STP, M.M
2	NIP	197605082006042003	2	NIP	198510102003121001
3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina / IV/a	3	PANGKAT/ GOL. RUANG	Pembina / IV/a
4	JABATAN	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	4	JABATAN	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
5	UNIT KERJA	SUB BAGIAN PROGRAM	5	UNIT KERJA	SUB BAGIAN PROGRAM

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

-

POLA DISTRIBUSI:

HASIL KERJA

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
UTAMA							
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penganggaran Perangkat Daerah berupa Renja 2025; RKA 2025; RKO Murni 2024; Perjanjian Kinerja 2024; DPA 2024; Renja Perubahan 2024; Perjanjian Kinerja Perubahan 2024; DPA Perubahan 2024.	Kuantitas	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	8 Dokumen	8 Dokumen berdasarkan Renja 2025, Renja Perubahan 2024, RKA 2024, RKA-P 2024, DPA 2024, DPPA 2024, PK 2024, PK Perubahan 2024	Pimpinan:
2	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa LKJiP 2023	Kuantitas	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen berdasarkan Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa LKJiP 2023	Pimpinan:

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Tersusunnya dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk Kabupaten Cilacap; Kabupaten Banyumas; Kabupaten Purbalingga; Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Sukoharjo; dan Kota Surakarta	Kuantitas	Jumlah draf Surat Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda dan Raperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen berdasarkan Tersusunnya dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk Kabupaten Cilacap; Kabupaten Banyumas; Kabupaten Purbalingga; Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Kara	Pimpinan:
			Waktu	Lamanya waktu yang dibutuhkan	3 Bulan	7 Dokumen berdasarkan Tersusunnya dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk Kabupaten Cilacap; Kabupaten Banyumas; Kabupaten Purbalingga; Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Kara	Pimpinan:

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Tersusunnya dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk Kabupaten Cilacap; Kabupaten Banyumas; Kabupaten Purbalingga; Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Sukoharjo; dan Kota Surakarta	Kuantitas	Jumlah draf Surat Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda dan Raperkada tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen berdasarkan Tersusunnya dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk Kabupaten Cilacap; Kabupaten Banyumas; Kabupaten Purbalingga; Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Su	Pimpinan:
			Waktu	Lamanya waktu yang dibutuhkan	3 Bulan	7 Dokumen berdasarkan Tersusunnya dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk Kabupaten Cilacap; Kabupaten Banyumas; Kabupaten Purbalingga; Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Su	Pimpinan:
5	Tersusunnya dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk Kabupaten Cilacap; Kabupaten Banyumas; Kabupaten Purbalingga; Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Sukoharjo; dan Kota Surakarta.	Kuantitas	Jumlah draf Surat Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda dan Raperkada tentang APBD Kabupaten/Kota	7 Dokumen	7 Dokumen berdasarkan Tersusunnya dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk Kabupaten Cilacap; Kabupaten Banyumas; Kabupaten Purbalingga; Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Sukoharjo; d	Pimpinan:

HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET / SESEUAI EKSPEKTASI	REALISASI BERDASARKAN BUKTI DUKUNG	UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Waktu	Lamanya waktu yang dibutuhkan	3 Bulan	7 Dokumen berdasarkan Tersusunnya dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk Kabupaten Cilacap; Kabupaten Banyumas; Kabupaten Purbalingga; Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Sukoharjo; d	Pimpinan:
6	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten Cilacap; Kabupaten Banyumas; Kabupaten Purbalingga; Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Sukoharjo; dan Kota Surakarta	Kuantitas	Jumlah dokumen pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen berdasarkan Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten Cilacap; Kabupaten Banyumas; Kabupaten Purbalingga; Kabupaten Banjarnegara; Kab	Pimpinan:
7	Terlaksananya Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Asistensi Pengelolaan Keuangan untuk Kabupaten Cilacap; Kabupaten Banyumas; Kabupaten Purbalingga; Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Sukoharjo; dan Kota Surakarta	Kuantitas	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen berdasarkan Terlaksananya Asistensi Pengelolaan Keuangan untuk Kabupaten Cilacap; Kabupaten Banyumas; Kabupaten Purbalingga; Kabupaten Banjarnegara; Kabupaten Karanganyar; Kabupaten Sukoharjo; dan Kota Surakarta	Pimpinan:
TAMBAHAN							

RATING HASIL KERJA SESUAI EKSPEKTASI			
PERILAKU KERJA			UMPAN BALIK BERKELANJUTAN BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1	Berorientasi Pelayanan		
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan:
2	Akuntabel		
	- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan:
3	Kompeten		
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan:
4	Harmonis		
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan:
5	Loyal		
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan:
6	Adaptif		
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan:
7	Kolaboratif		
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan:	Pimpinan:

RATING PERILAKU KERJA SESUAI EKSPEKTASI
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI BAIK

Semarang, 2 Januari 2025

Pegawai yang Dinilai

IKA RAHAYU MURWANIATUN, S.E, M.M
197605082006042003

Pejabat Penilai Kinerja

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BPKAD

OKY HARIS SETYAWAN, S.STP, M.M
198510102003121001